

## BAB V

### KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS PADA MASA JOE BIDEN DALAM PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA

#### 5.1 Janji Joe Biden terhadap Konflik Israel-Palestina selama kampanye

Kampanye adalah bertujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak dengan tindakan komunikasi yang terencana yang dilakukan secara berkelanjutan dengan kurun waktu tertentu.<sup>51</sup> Dalam kampanye di AS umumnya yaitu dua kandidat dari Partai Demokrat dan Partai Republik, dua partai besar yang senantiasa memerintah AS secara bergiliran. Tetapi tidak tertutup kemungkinan munculnya kandidat lain dari kubu yang berbeda. Saat-saat kampanye adalah saat yang paling menentukan bagi kandidat. Kandidat benar benar diuji kemampuannya dari mulai penampilannya, materi program, sampai gaya bicarannya agar mendapat perhatian besar dari khalayak. Masyarakat AS cukup selektif dan kritis terhadap kondisi kandidat, maka pilihan mereka kadang berubah-ubah beralih kepada kandidat lain yang terpercaya hanya karena program yang tidak meyakinkan dari calon unggulan sebelumnya.

Selama kampanye Joe Biden berlangsung dalam menampilkan dirinya didepan masyarakat AS, Joe Biden berusaha memanfaatkan kondisi yang ada, mulai dari kondisi COVID-19. Dari adanya fenomena COVID-19 Joe Biden berjanji bahwa

---

<sup>51</sup> Rogers dan Storey dalam Antar Venus. "Manajemen Kampanye", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004). hal 7.

jika terpilih sebagai presiden ia akan melakukan yang terbaik untuk membuat masyarakat AS divaksinasi agar kehidupan kembali normal. Joe Biden mengumumkan rencana enam bagian untuk mengendalikan COVID-19. Rencana tersebut mencakup mandat vaksin untuk pekerja federal, kontraktor pemerintah, dan yang bekerja diperusahaan swasta, peningkatan distribusi dan biaya yang lebih rendah untuk tes COVID-19, termasuk tes cepat dirumah, dan protokol kesehatan COVID-19 yang lebih kuat disekolah, protokol kesehatan transportasi antara negara bagian.<sup>52</sup>

Joe Biden juga membuat kampanye untuk muslim di AS yang bernama “*Muslims For Biden*” berjanji melindungi hak sipil dan hak konstitusional warga muslim di AS, menghormati komunitas dan keberagaman muslim di AS, kemudian dibidang kesehatan Biden juga dalam kampanye untuk muslimnya mengatakan bahwa Biden akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, memastikan pelayanan kesehatan yang layak, membangun kembali ekonomi dengan kelas menengah yang lebih tangguh dan inklusif, dan membuat masyarakat lebih aman.<sup>53</sup>

Dalam kampanye Joe Biden untuk mendapatkan suara dari warga dari berbagai ras menyuarakan kampanye *Black Lives Matter* (BLM) yang ramai dibicarakan warga AS sejak insiden George Floyd kampanye berupaya untuk menjunjung tinggi hak orang kulit hitam di AS. Hal ini terlihat dari beberapa program

---

<sup>52</sup> Julie Appleby dan Victoria Knight, “*Get COVID-19 under control*”, 2021. Diakses melalui: <https://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/biden-promise-tracker/promise/1517/get-covid-19-under-control/> pada 23 Juli 2022.

<sup>53</sup> Politifact.com, “*Muslims for Biden*”, 2020a. Diakses melalui: <https://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/biden-promise-tracker/promise/1517/get-covid-19-under-control/> pada 23 Juli 2022.

kerja yang menjadi rencana kerja apabila kedua kandidat ini terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden AS. Berikut janji kampanye untuk masyarakat kulit hitam yang disebut sebagai “*Lift Every Voice*”, diantaranya yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Memajukan mobilitas ekonomi orang Afrika-Amerika dan menutup kesenjangan kekayaan dan pendapatan rasial
- 2) Membuat investasi untuk menghentikan kesenjangan dibidang kesehatan berdasarkan ras
- 3) Perluas kepemilikan rumah Afrika-Amerika dan akses ke perumahan yang aman dan terjangkau
- 4) Memperkuat komitmen AS terhadap keadilan
- 5) Membuat hak untuk memilih dan hak atas perlindungan yang sama dan nyata bagi African-American

Pada masa kampanyenya Joe Biden sebagian besar menghindari berbicara tentang konflik Israel/Palestina sejak menyatakan pencalonannya, pada Februari 2019 kampanye akan fokus pada pengalaman dan keahlian kebijakan luar negerinya.<sup>55</sup> Joe Biden dalam mengartikulasikan bisi kebijakan luar negerinya bahkan belum membahas konflik Israel-Palestina secara mendalam. Salah satu pidato Joe Biden tentang Israel dalam pidato kampanye itu untuk menggambarkan “mendukung

---

<sup>54</sup> Made Fitri Maya Padmi & Mahda Ayu Ningrum. “Politik Identitas dan Gerakan Black Lives Matter dalam Kampanye Politik Joe Biden-Kamala Harris pada Pemilu Amerika Serikat Tahun 2020”. *Global Insight Journal*. Vol, 07. No, 01. (2022). hal 5-7.

<sup>55</sup> Elena Schor & Thomas Beaumont. “*Joe Biden puts foreign policy at heart of his 2020 presidential bid*”, 2019. Diakses melalui: <https://www.timesofisrael.com/joe-biden-puts-foreign-policy-at-heart-of-his-2020-presidential-bid/> pada 20 Juli 2022.

komitmen kuat terhadap keamanan Israel terlepas dari seberapa besar mungkin tidak setuju dengan pemimpin saat ini”. Jadi ketika Joe Biden mengambil alih Gedung Putih para pembela hak-hak Palestina dan pemilih Arab-Amerika yang mendukungnya tidak menaruh harapan tinggi untuk perubahan sikap AS terhadap Israel di bawah kepemimpinannya.

Jika dilihat dalam konflik Israel-Palestina Donald Trump selama pemerintahannya sampai menjadi kandidat pemilihan presiden ke-46 sangat pro-Israel, tetapi Joe Biden membangun citranya memunculkan sisi positif dalam dirinya yaitu suatu calon pemimpin yang memiliki jiwa multikultural, Joe Biden telah berjanji untuk mengambil pendekatan yang berbeda terhadap hubungan Palestina dari Donald Trump. Joe Biden juga merayu pemilih Arab dan Muslim dengan sedikit perubahan kebijakan tentang Israel-Palestina.

Adapun janji-janji Joe Biden terhadap konflik Israel-Palestina selama kampanye yaitu:

- 1) Pada tahun 2019, Donald Trump menutup konsulat AS di kota suci yang memberikan layanan kepada warga Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza sejak 1967. Selama kampanye Joe Biden berulang kali berjanji untuk

membuka kembali konsulat yang khusus ditujukan untuk urusan Palestina di Yerusalem.<sup>56</sup>

- 2) Pada tahun 2019, Donald Trump memotong bantuan AS melalui UNRWA. Joe Biden berjanji untuk memulihkan bantuan AS untuk Palestina dan memulihkan hubungan diplomatic AS dengan Otoritas Palestina.<sup>57</sup>
- 3) Joe Biden berjanji untuk menentang pencaplokan dan perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat.<sup>58</sup>
- 4) Joe Biden berjanji agar dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan mengedepankan proses solusi dua negara yang selama ini dihiraukan Donald Trump. Pendekatan solusi dua negara akan mengupayakan Israel dan Palestina agar berdiri berdampingan sebagai negara yang berdaulat.

## 5.2 Pembicaraan damai Israel-Palestina di Era Joe Biden

Gencatan senjata Gaza selama 11 hari konflik Israel Palestina pada tahun 2021 membuat korban tewas sipil meningkat. Presiden Joe Biden tidak berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, meskipun Joe Biden berbicara dengan Netanyahu ia memulai negosiasi dibelakang layar untuk mengakhiri pertempuran pada Mei 2021. “Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak tawaran sebelumnya

---

<sup>56</sup> Aljazeera. “*Why Biden’s Jerusalem consulate promise remains unfulfilled*”, 2022. Diakses melalui: <https://www.aljazeera.com/news/2022/1/20/why-biden-jerusalem-consulate-promise-remains-unfulfilled> pada 19 Juli 2022.

<sup>57</sup> Aljazeera. “*US to restore aid to UN Palestinian refugee agency cut by Trump*”, 2021. Diakses melalui: <https://www.aljazeera.com/news/2021/4/7/us-announces-it-will-restore-aid-to-palestinians-cut-by-trump> pada 18 Juli 2022.

<sup>58</sup> Aljazeera. “*US says it ‘strongly’ opposes Israel’s settlement expansion plans*”, 2021. Diakses melalui: <https://www.aljazeera.com/news/2021/10/26/us-says-it-strongly-opposes-israels-settlement-expansion-plans> pada 18 Juli 2022.

dari sebuah telepon dari Blinken, ia mengatakan ingin mendengar langsung dari Presiden AS” menurut laporan media.<sup>59</sup> Joe Biden juga mengirim telegram posisinya selama kampanye bahwa Joe Biden tidak membalikkan pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, relokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan pengakuan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Joe Biden juga memulihkan program bantuan orang-orang Palestina.



**Gambar 5.1**

Pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Israel Reuven Rivlin di Gedung Putih

*Sumber: [www.dw.com](http://www.dw.com)*

Pada bulan 28 Juni 2021 Presiden Joe Biden bertemu dengan Presiden Reuven Rivlin di Gedung Putih. Para pemimpin membahas perkembangan terakhir di Tepi Barat dan Gaza. Presiden Joe Biden menekankan pentingnya Israel

---

<sup>59</sup> I24NEWS. “PA chief Abbas rejected phone call from Blinken, seeks to speak to Biden: report”, 2021.

Diakses melalui: <https://www.i24news.tv/en/news/middle-east/1617282234-pa-chief-abbas-rejected-phone-call-from-blinken-seeks-to-speak-to-biden-report> 8 Juli 2022.

mengambil langkah-langkah untuk memastikan stabilitas, ketenangan, dan untuk mendukung peluang ekonomi yang besar bagi rakyat Palestina. Presiden Joe Biden menegaskan pandangannya bahwa solusi dua negara yang dirundingkan tetap merupakan jalan yang terbaik untuk menciptakan perdamaian abadi.<sup>60</sup>

Pada 27 Agustus 2021 Presiden Joe Biden bertemu dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennet di Gedung Putih untuk menegaskan kembali kemitraan bersejarah antara AS dan Israel. Presiden dan Perdana Menteri Bennet bertukar pandangan tentang upaya untuk memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Presiden mengatakan pentingnya langkah-langkah untuk meningkatkan kehidupan rakyat Palestina dan mendukung peluang ekonomi yang lebih besar bagi mereka. Dia juga menggarisbawahi pentingnya menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan, berkontribusi pada rasa ketidakadilan, dan melemahkan upaya untuk membangun kepercayaan. Presiden Joe Biden menegaskan kembali pandangannya bahwa solusi dua negara yang dinegosiasikan bersama adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mencapai resolusi yang langgeng terhadap konflik Israel-Palestina.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> The White House. “*Statements and Releases: Readout of President Joseph R. Biden, Jr. Meeting with President Reuven Rivlin of Israel*”, 2021. Diakses melalui: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/28/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-meeting-with-president-reuven-rivlin-of-israel/> pada 9 Juli 2022.

<sup>61</sup> The White House. “*Statements and Releases: Readout of President Joseph R. Biden, Jr. 's Meeting with Prime Minister Naftali Bennett of Israel*”, 2021. Diakses melalui: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/27/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-s-meeting-with-prime-minister-naftali-bennett-of-israel/> 7 Juli 2022.



**Gambar 5.2**

Presiden Amerika Serikat Joe Biden tampil bersama Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas didepan media di Tepi Barat, Palestina.

*Sumber: [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)*

Pada 15 Juli 2022 Presiden Joe Biden bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas membicarakan bahwa Palestina butuh penyelesaian melalui jalur politik agar bias berdamai dengan Israel. Joe Biden mengatakan bahwa komitmen untuk memberikan upaya penuh bagi penyelidikan penembakan reporter Al Jazeera berkebangsaan Palestina. Biden menegaskan ulang dukung untuk keberadaan negara Palestina. Walaupun Joe Biden mengakui bahwa Palestina sangat berbeda dalam memandang keberadaan masing-masing negara. Mahmoud Abbas mengartikulasikan frustrasi panjang Palestina atas pendudukan Israel yang berada dikawasan tersebut, ia juga menyebutkan bahwa rakyat Palestina menanti upaya AS mengentikan perluasan



pemukiman Israel serta kekerasan para pemukim tersebut, sekaligus menghentikan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Joe Biden menyatakan keberpihakan dan menawarkan bantuan keuangan bagi rakyat Palestina. Biden pun berjanji negaranya tidak akan pernah menyerah untuk mendekatkan Israel dan Palestina.<sup>62</sup>

### **5.3 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada masa Joe Biden terkait**

#### **Konflik Israel-Palestina**

Setelah beberapa dekade negosiasi yang terputus-putus dan inisiatif perdamaian yang gagal, inilah saatnya untuk perubahan di AS yaitu kebijakan menuju perdamaian Israel-Palestina. Kampanye Joe Biden dan kepresidenan awal untuk mengejar kebijakan luar negeri yang akan berpusat pada hak asasi manusia. Joe Biden telah menumbuhkan optimisme bahwa AS akan terlibat kembali secara bermakna dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Terpilihnya Joe Biden telah mengisyaratkan penolakannya untuk mengembalikan beberapa kebijakan Trump yang paling memecah belah dalam konflik tersebut. Joe Biden tidak diragukan lagi akan mengambil pendekatan yang lebih adil dan multilateral untuk konflik Israel-Palestina berbeda dari pendahulunya, tetapi masa jabatannya tidak mungkin untuk mengantar perubahan yang signifikan dalam kebijakan AS.

---

<sup>62</sup> Palupi Annisa Auliani, “*Biden: Palestina Butuh Penyelesaian Jalur Politik*”, 2022. Diakses melalui: <https://www.kompas.com/global/read/2022/07/16/142051570/biden-palestina-butuh-penyelesaian-jalur-politik?page=all> pada 14 Juli 2022.

### 5.3.1 Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis AS-Israel

Amerika Serikat dan Israel menegaskan bahwa ikatan yang tidak dapat dipatahkan antara kedua negara mempunyai komitmen abadi AS terhadap keamanan Israel. Kemitraan strategis AS dan Israel di tegaskan kembali didasarkan pada kepentingan bersama, persahabatan sejati dan landasan nilai-nilai bersama. Nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah komitmen yang teguh terhadap supremasi hukum, demokrasi, dan memperbaiki dunia.

Konsisten antara AS dan Israel dalam hubungan keamanan yang telah berlangsung lama antara AS dan Israel tak dapat tergoyahkan komitmen AS terhadap keamanan Israel, terutama pada mempertahankan keunggulan militernya, AS menegaskan kembali untuk memperkuat kemampuan Israel untuk menghalangi musuh dan untuk mempertahankan dirinya terhadap setiap ancaman atau kombinasi dari ancaman. AS lebih lanjut menegaskan bahwa komitmen ini bukan hanya komitmen moral tetapi juga komitmen strategis yang sangat penting bagi keamanan nasional AS sendiri.

Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Yair Lapid melakukan pertemuan pada tanggal 13 Juli 2022 lalu keduanya menandatangani deklarasi bersama yaitu untuk menegaskan kembali kemitraan dan kerjasama kedua negara pada hari kedua pertemuan di Yerusalem. AS dan Israel mendokumentasikan bahwa tidak ada yang lebih mencerminkan dukungan teguh dan kebijakan luar negeri yang disokong oleh AS terhadap keamanan Israel daripada Nota Kesepahaman yang belum

pernah dilakukan maupun terjadi sebelumnya tentang bantuan keamanan yang ditandatangani oleh pemerintahan AS berturut-turut selama beberapa dekade terakhir, dan bahwa Nota Kesepahaman ini menunjukkan bahwa AS menganggap keamanan Israel penting bagi stabilitas regional dan kepentingan AS.<sup>63</sup>

AS sangat mendukung penerapan ketentuan dari Nota Kesepahaman senilai \$38 miliar yang menghormati komitmen abadi AS terhadap keamanan Israel, bantuan keamanan yang dipasok ke Israel oleh AS, serta keyanikanannya bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) tindak lanjut harus mengatasi ancaman yang muncul dan realitas baru. Selain itu AS berkomitmen untuk mencari bantuan pertahanan rudal tambahan yang melebihi tingkat MoU, seperti keadaan sebelas hari Hamas pada Mei 2021. Israel sangat menghargai komitmen AS terhadap MoU setelah konflik 2021 untuk memberikan tambahan \$1 miliar di atas tingkat MoU dalam pendanaan rudal tambahan. Peristiwa penting dalam upaya bersama AS-Israel untuk membangun kerangka kerja regional baru yang mengubah figur Timur Tengah yang diprakarsai dan diselenggarakan oleh Perdana Menteri Lapid.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> The Jerusalem Post. “*What is in the US-Israel joint declaration? – explainer*”, 2022. Diakses melalui: <https://www.jpost.com/israeli-news/article-712083>. Pada 20 Juli 2022.

<sup>64</sup> The White House. “*Statements and Releases: The Jerusalem U.S.-Israel Strategic Partnership*”, 2022. Diakses melalui: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/14/the-jerusalem-u-s-israel-strategic-partnership-joint-declaration/> pada 23 Juli 2022.

### 5.3.2 Bantuan untuk Israel

Pendanaan bantuan militer yang dilakukan Amerika Serikat kepada Israel setiap tahunnya yaitu \$3,8 miliar. Pada era pemerintahan Joe Biden dimulai pada Februari 2021, kesepakatan senjata besar dengan AS untuk memasok Angkatan Udara Israel dengan banyak amunisi. Kesepakatan antara AS dan Kabinet Israel setuju untuk menggunakan sekitar NIS 9 miliar atau \$2,74 miliar bantuan militer untuk membeli helikopter angkut berat, jet tempur F-35 dan F-15, pesawat pengisian bahan bakar dan peralatan lain yang dianggap penting oleh militer, seperti rudal pencegat dan bom canggih untuk pesawat.<sup>65</sup>

Pemerintahan Joe Biden pada Mei 2021, menyetujui transfer senjata berteknologi bom canggih sebesar \$735 juta yang sebagian besar terdiri dari *Joint Direct Attack Munitions* (JDAM) buatan Boeing. Senjata canggih JDAM adalah kit yang bias mengubah bom yang mulanya tidak berpemandu bias menjadi rudal berpemandu presisi dengan menggunakan Global Positioning System (GPS)<sup>66,67</sup>

Departemen Luar Negeri AS pada Agustus 2021 menyetujui penjualan 18 helikopter angkut berat CH-53 King Stallion ke Israel seharga \$3,4 miliar. Paket yang

---

<sup>65</sup> Judah Ari Gross, “Ministers approve NIS 9 billion purchase of aircraft, arms from US”, 2021. Diakses melalui: <https://www.timesofisrael.com/ministers-approve-9-billion-purchase-of-aircraft-arms-from-us/> pada 3 Agustus 2022.

<sup>66</sup> Jacqueline Alemany, “Power Up: Biden administration approves \$735 million weapons sale to Israel, raising red flags for some House Democrats”, 2021. Diakses melalui: <https://www.washingtonpost.com/politics/2021/05/17/power-up-biden-administration-approves-735-million-weapons-sale-israel-raising-red-flags-some-house-democrats/> pada 3 Agustus 2022.

<sup>67</sup> Intan Rakhmayanti Dewi, “Mengenal Teknologi Bom Canggih AS yang Dijual ke Israel”, 2021. Diakses melalui: <https://www.inews.id/techno/sains/mengenal-teknologi-bom-canggih-as-yang-dijual-ke-israel> pada 3 Agustus 2022.

dikirim untuk Israel mencakup hingga 60 mesin T408-GE-400 yang dibuat oleh General Electric, 36 sistem navigasi dan sejumlah senapan mesin GAU-21 kaliber 0,50 yang tak ditentukan. Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan bahwa penjualan akan meningkatkan kemampuan IAF untuk mengangkut kendaraan lapis baja, personel dan peralatan untuk mendukung operasi militer untuk mempertahankan tanah air Israel dan sebagai pencegah ancaman regional.<sup>68</sup>

Selama Operasi Penjaga Tembok, Presiden Joe Biden berjanji untuk menyediakan \$1 miliar untuk mengisi kembali stok Iron Dome yang habis saat itu. Pada September 2021, DPR AS memberikan suara sangar besar 420-9 untuk meloloskan Iron Dome Supplemental Appropriations Act untuk system pertahanan rudal Israel.<sup>69</sup>

Otorisasi Pertahanan untuk tahun 2022 disahkan pada bulan Desember 2021. Ini termasuk otorisasi pendanaan sebesar \$500 juta untuk Israel, \$200 juta untuk pengadaan pertanian rudal, \$300 juta untuk “Program Koperasi AS-Israel”. Tambahan \$30 juta selama 5 tahun untuk mendanai kerjasama keamanan siber AS-Israel. Dibulan yang sama AS dan Israel menandatangani kesepakatan pertahanan senilai \$3 miliar yang akan memasok 12 helikopter Lockheed Martin-Sikorsky dan dua pesawat


---

<sup>68</sup> Dan Arkin, “US State Department approves sale of CH-53K helicopters to Israeli Air Force”, 2021. Diakses melalui: <https://www.israeldefense.co.il/en/node/51168> 3 Agustus 2022.

<sup>69</sup> Times of Israel. “US House okays Iron Dome funding in 420-9 vote after delay caused by ‘Squad’”, 2021. Diakses melalui: [https://www.timesofisrael.com/liveblog\\_entry/us-house-okays-iron-dome-funding-in-420-9-vote-after-delay-caused-by-squad/](https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/us-house-okays-iron-dome-funding-in-420-9-vote-after-delay-caused-by-squad/) pada 3 Agustus 2022.

pengisian bahan bakar Boeing KC-46 dan tambahan \$1 miliar mencakup pembelian dibawah perjanjian yang terpisah.<sup>70</sup>

Pada bulan Maret 2022, Kongres menyetujui paket pendanaan terbesar Israel dalam sejarah, yaitu sebagai berikut:<sup>71</sup>

- 
- \$1 miliar dalam pendanaan darurat Iron Dome
  - \$3,3 miliar dalam bentuk bantuan keamanan
  - \$500 juta dalam kerjasama pertahanan rudal
  - \$25 juta untuk memerangi terorisme drone
  - \$47,5 juta untuk teknologi anti-tunneling
  - \$4 juta untuk kerjasama perawatan kesehatan AS-Israel
  - \$6 juta untuk kerjasama energi AS-Israel
  - \$1 juta untuk kerjasama pertanian AS-Israel
  - \$2 juta untuk kerjasama keamanan dalam negeri AS-Israel
  - \$50 juta untuk Nita M. Lowkey Middle East Partnership for Peace Act untuk mendorong kerjasama ekonomi dan program pembangunan perdamaian antar warga antara AS, Israel, dan Palestina
  - \$2 juta untuk kerjasama pembangunan internasional AS-Israel

---

<sup>70</sup> Algemeiner. "US and Israel Ink Defense Agreements to Supply New Fleet of Helicopters, Refueling Aircraft", 2021. Diakses melalui: <https://www.algemeiner.com/2021/12/31/us-and-israel-ink-defense-agreements-to-supply-new-fleet-of-helicopters-refueling-aircraft/> pada 3 Agustus 2022.

<sup>71</sup> Jeremy M. Sharp. *Ibid.* hal. 50.

- \$6 juta untuk program the Middle East Regional Cooperation untuk memfasilitasi kerjasama penelitian antara Israel dan negara-negara lain dikawasan
- \$5 juta untuk pemukiman kembali pengungsi di Israel

### 5.3.3 Bantuan untuk Palestina

Pengurangan dana yang dilakukan AS pada Kebijakan Trump untuk bantuan Palestina maupun lewat UNRWA diawali setelah diselenggarakannya sidang Umum PBB yang membahas tentang status Yerusalem. Pemerintahan Joe Biden telah mengumumkan rencana kebijakan luar negerinya untuk melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina dan untuk memenuhi janji kampanyenya. Presiden Joe Biden mengumumkan rencana untuk memberikan bantuan kepada Palestina sebesar \$290 juta. Pada Maret 2021 pemerintahan Joe Biden mengumumkan akan memberikan dana \$75 juta dalam bentuk bantuan untuk kesehatan, infrastruktur, dan kelompok masyarakat sipil serta \$15 juta bantuan untuk virus COVID-19.<sup>72</sup> Pendanaan untuk memberikan bantuan COVID-19 untuk obat-obatan, persediaan medis dan termasuk semua perawatan kesehatan maupun bantuan uang tunai dan makanan untuk keluarga yang terkena dampak COVID-19.<sup>73</sup> Pada awal April 2021, pemerintah memberi tau anggota parlemen bahwa mereka akan

<sup>72</sup> Matthew Lee, "US boosts aid to Palestinians as some in Congress cry foul", 2021. Diakses melalui: <https://apnews.com/article/israel-united-nations-west-bank-2c06e15f39106f712a402211f3caa69a> pada 3 Agustus 2022.

<sup>73</sup> Antony. J. Blinken, "Press Statement: The United States Restores Assistance for the Palestinians", 2021. Diakses melalui: <https://www.state.gov/the-united-states-restores-assistance-for-the-palestinians/> pada 3 Agustus 2022.

memberi Palestina \$40 juta untuk menegakan hukum dan keamanan, \$10 juta untuk program pembantuan perdamaian melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).<sup>74</sup>

Departemen Luar Negeri mengatakan mendukung solusi abadi untuk konflik Israel-Palestina adalah tujuan ini keamanan nasional AS. Ia juga mengatakan “Sebagai bagian penting dari upaya ini, bantuan pemerintah AS untuk Palestina berupaya membangun institusi keamanan dan peradilan pidana yang akuntabel dan professional untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Tepi Barat, berkontribusi langsung pada keamanan regional, melindungi penduduk dan menegakan supremasi hukum”.

Departemen Luar Negeri juga mengatakan kontribusi sebesar \$150 juta kepada badan tersebut untuk diperlukan untuk layanan bantuan pengungsi atau UNRWA. Setelah terjadinya **genjatan senjata dalam perang antara Hamas dan Israel**. Blinken mengumumkan pada 26 Mei 2021, AS menjanjikan \$38 juta bantuan baru untuk mendukung upaya kemanusiaan di Tepi Barat dan Gaza (termasuk \$33 untuk UNRWA) dan tambahan \$5,5 juta untuk mitra kemanusiaan. Bantuan kritis ini akan mendukung organisasi kemanusiaan untuk menyediakan tempat penampungan darurat, makanan, perawatan kesehatan, dan barang bantuan serta dukungan kesehatan mental bagi mereka yang mengalami trauma. Departemen Luar Negeri dan USAID berencana untuk memberikan \$75 juta dalam pembangunan tambahan dan

---

<sup>74</sup> BBC. “*Biden administration to restore \$235m in US aid to Palestinians*”, 2021. Diakses melalui: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56665199> 1 Agustus 2022.



bantuan ekonomi. \$10 juta untuk mendukung program yang mendukung pekerjaan rekonsiliasi untuk mengurangi ketegangan dan kekerasan dalam jangka panjang. Total bantuan AS menjadi lebih dari \$360 juta.<sup>75</sup>

Dana operasional UNRWA berasal dari negara-negara yang memberikan dana secara sukarela. UNRWA mencatat pada tahun 2021, Amerika Serikat berada di urutan teratas, disusul oleh Germany, Sweden, Japan, dan Inggris yang menempati lima donatur utama UNRWA<sup>76</sup>

Selama Pemerintahan Joe Biden lebih banyak bantuan dijanjikan. Pada maret 2022, Kongres menyetujui \$219 juta bantuan untuk Palestina untuk tahun 2022. Ini kurang dari \$225 juta yang awalnya diusulkan oleh Senat dan DPR tetapi lebih dari permintaan Presiden Joe Biden. Bantuan ini difokuskan pada sanitasi dan air.<sup>77</sup> Presiden Joe Biden mengumumkan pada Juli 2022 bahwa AS akan memberikan tambahan \$201 juta kepada UNRWA. Dana baru ini membawa total bantuan AS ke UNRWA selama Pemerintahan Joe Biden menjadi lebih dari \$618 juta. AS juga memberikan tambahan \$100 juta untuk mendukung layanan kesehatan bagi warga Palestina diseluruh Jaringan Rumah Sakit Yerusalem Timur (EJHN). Menurut White House “EJHN adalah pengelompokan enam rumah sakit di Yerusalem Timur yang menyediakan layanan khusus termasuk dialysis, onkologi, perawatan intensif

---

<sup>75</sup> Antony J. Blinken, “*Press Statement: U.S. Assistance for the Palestinian People*”, 2021. Diakses melalui: <https://www.state.gov/u-s-assistance-for-the-palestinian-people/> pada 29 Juli 2022.

<sup>76</sup> UNRWA Funding Trends, 2021. Diakses melalui: <https://www.unrwa.org/how-you-can-help/government-partners/funding-trends/> diakses pada 4 Juli 2022.

<sup>77</sup> Marc Rod, “*Israel enthusiastic about U.S. resuming Palestinian aid, Power tells Congress*”, 2022. Diakses melalui: <https://jewishinsider.com/2022/05/samantha-power-usaid-palestinian-aid-israel-house-foreign-affairs/> pada 29 Juli 2022.

neonates, oftalmologi, layanan bersalin, dan darurat khusus untuk 50.000 pasien dari Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Pendaan yang disediakan oleh USAID dan dipasangkan dengan reformasi system kesehatan dan rumah sakit.

Pemerintahan Joe Biden juga setuju bahwa AS akan memberikan bantuan kemanusiaan tambahan sebesar \$15 juta untuk warga Palestina yang rentan. Melalui pendanaan untuk Program Pangan Dunia PBB dan dua organisasi non-pemerintah AS menyediakan bantuan tunai multiguna, voucher makanan ektronik, dan dukungan mata pencaharian darurat yang membantu lebih dari 210.000 orang yang rawan pangan memenuhi pangan rumah tangga mereka dalam beberapa bulan mendatang.<sup>78</sup>

AS selalu menjadi pembela setia Israel, tetapi Trump membawa hubungan itu terlalu jauh dengan memblokir hamper semua bantuan ke Palestina. Langkah itu secara luas dilihat sebagai upaya untuk memaksa Palestina untuk bernegosiasi dengan Israel dengan syarat. Sementara Joe Biden berjanji untuk memulihkan hubungan diplomatik AS dengan Otoritas Palestina dan memulihkan bantuan AS untuk Palestina, pemerintahan Joe Biden telah mengisyaratkan penolakannya untuk membalikan bebrapa kebijakan Trump yang memecah belah dalam konflik Israel-Palestina. Pemerintahan Joe Biden menempatkan pendekatan berbasis hak di pusat strateginya. Sebagaimana didefinisikan secara luas, akan memprioritaskan perlindungan hak dan keamanan manusia Palestina dan Israel.

---

<sup>78</sup> White House. “*Statements and Releases. FACT SHEET: The United States-Palestinian Relationship*”, 2022. Diakses melalui: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/14/fact-sheet-the-united-states-palestinian-relationship/> pada 28 Juli 2022.

Berdasarkan Teori Kebijakan Luar Negeri dalam buku *Decision-Making as an Approach to the Study of International Politic*, Richard Snyder sebagai pakar politik asal Amerika Serikat mengatakan kebijakan luar negeri adalah sebagai strategi atau pendekatan yang dipilih oleh pemerintah suatu bangsa dalam mencapai kepentingannya dengan hubungannya dengan entitas lain.

Konflik Israel-Palestina pada dasarnya merupakan akar penyebab dari banyak ketidakstabilan di Timur Tengah. Maka para pemimpin global harus dapat bekerja secara kolektif untuk mewujudkan negosiasi. Dengan melihat konflik Israel-Palestina, AS mengeluarkan kebijakan luar negerinya, konflik Israel-Palestina adalah masalah regional yang upaya perdamaianya bersifat global. Kebijakan luar negeri Joe Biden merupakan bentuk dari proses perdamaian yang diupayakan oleh Amerika Serikat melalui pembicaraan langsung untuk mengakhiri konflik ini sehingga tercapai perdamaian.

Dalam konflik Israel Palestina memakai Konsep Bantuan Luar Negeri, dalam artikel yang berjudul *A Political Theory of Foreign Aid*, Morghentau mengidentifikasi enam jenis kebijakan bantuan luar negeri yaitu: bantuan kemanusiaan, subsistence, militer, bantuan pada hal-hal mendasar suatu negara (fundamental), serta bantuan untuk pembangunan ekonomi.

Berdasarkan konflik Israel-Palestina, bantuan luar negeri sebagai dampak pada dukungan dan pengaruh aktor internasional terhadap negara Israel maupun negara Palestina. AS memiliki kepentingan dalam melindungi keamanan sekutu

jangka panjangnya yaitu Israel. Tetapi pada masa pemerintahan Joe Biden yang harus memperbarui hubungan dengan Palestina, bantuan luar negeri memberikan dana untuk Palestina, yang pada era Trump dihentikan, membangun kembali kepercayaan dengan Palestina sehingga AS dapat melanjutkan perannya sebagai perantara yang jujur dalam konflik Israel-Palestina. Serta tercapainya solusi dua negara dan hidup berdampingan secara damai.

#### **5.4 Sikap Amerika Serikat terhadap Perjuangan Palestina di PBB**

Awal mula saat Palestina berada di bawah pemerintahan Inggris Raya sejak 1922. Sejak saat itu imigrasi Yahudi ke wilayah itu meningkat. Ketegangan antara orang-orang keturunan Arab dan Yahudi juga meningkat. PBB membentuk Komite Khusus untuk Palestina (UNSCOP) adalah sebuah komite penyelidikan yang terdiri dari anggota dari 11 negara. Lalu pada tahun 1947, diajukan ke Majelis Umum PBB. Resolusi PBB 181 ketika disahkan oleh Majelis Umum memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua negara, satu Arab satu Yahudi dengan rezim internasional khusus.<sup>79</sup> Resolusi yang disahkan dengan 33 suara mendukung, 13 menentang dan 10 abstain. Resolusi tersebut jadi dasar Israel mendirikan negaranya sendiri. Sementara itu ketegangan dengan Palestina yang belum terselesaikan.

Dalam beberapa dekade sejak itu perselisihan Israel-Palestina terus berkobar menjadi konflik, pemberontakan bersenjata (intifada), termasuk perang multinegara, dan aksi teroris. Usaha-usaha yang dilakukan Palestina untuk mengakhiri pendudukan

---

<sup>79</sup> Britannica. "United Nations Resolution 181". Diakses melalui: <https://www-britannica-com.translate.google.com/topic/United-Nations-Resolution-181> pada 2 Agustus 2022.

dan menyelesaikan masalah Palestina dalam semua aspeknya sampai saat ini belum ada penyelesaian. Ketegangan Palestina dan Israel kembali panas pada tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Oslo tahun 1933 bagian di wilayah Yerusalem Timur merupakan ibu kota Palestina yang terdiri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat. Israel tetap memperluas batas kota Yerusalem dengan membangun ribuan rumah pemukiman illegal di Yerusalem Timur. Menurut hukum internasional pemukiman Israel ini dianggap illegal.<sup>80</sup>

Terjadi kembali serangan yang cukup besar dari Israel ke Palestina yang menarik perhatian dalam dunia Internasional. Banyak negara-negara maupun Organisasi Internasional yang membantu dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Genjatan senjata dilakukan oleh Israel dan Palestina, karena situasi mengancam akan memicu krisis kemanusiaan yang lebih besar di Gaza, komunitas global yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersatu untuk segera mengakhiri konflik tersebut. Berbagai pertemuan yang dipimpin oleh PBB, baik ditingkat Majelis Umum maupun Dewan Keamanan berlangsung.

Majelis Umum PBB telah melakukan voting mengenai pembahasan agenda sidang yaitu untuk resolusi “*responsibility to protect and the prevention of genocide, ethnic cleansing, war crimes, and crimes against humanity*”. Agenda rancangan resolusi membahas mengenai penentuan mata agenda baru taunan Sidang Majelis

---

<sup>80</sup>Rosy Dewi Arianti, “Resolusi 181 PBB dan Solidaritas Internasional untuk Palestina”, 2021. Diakses melalui: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/29/143000265/hari-ini-dalam-sejarah--resolusi-181-pbb-dan-solidaritas-internasional?page=all> pada 29 Juli 2022.

Umum PBB tentang Responsibility to Protect (R2P), secara internasional merupakan prinsip sudah diterima dalam The Summit Outcome Document pada tahun 2005. Dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 21 Mei 2021 ada 115 negara voting ya, 15 negara voting tidak, dan ada 28 negara yang abstain.<sup>81</sup>

Peran Dewan Keamanan PBB meminta kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata. Dewan Keamanan PBB meminta agar semua pihak mengirimkan bantuan kemanusiaan pada penduduk sipil Palestina di Jalur Gaza. Anggota DK PBB mengakui bahwa Mesir berperan penting karena Mesir menjadi salah satu negara yang berhasil meredakan ketegangan Israel-Gaza pada tahun 2014. Abdel Fatah as-Sisi yang merupakan Presiden Mesir berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden membahas mengenai langkah untuk mengakhiri konflik. Joe Biden mengarahkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan untuk menghubungi rekan-rekan Israel mereka. Mesir juga berdiskusi dengan Antonio Guterres selaku Sekjen PBB yang mendiskusikan mengenai agar pemberhentian kekerasan, dan mengenai pentingnya meluncurkan usaha kolektif internasional yang ditujukan pada jalan negosiasi antara kedua pihak untuk meraih perdamaian.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Rahel Narda Chaterine, “Pertemuan Majelis Umum PBB, Menlu Retno Serukan Penghentian Kekerasan terhadap Warga Palestina”, 2021. Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/21/08322721/pertemuan-majelis-umum-pbb-menlu-retno-serukan-penghentian-kekerasan> pada 28 Juli 2022.

<sup>82</sup> Nurul Hidayah, Serangan Israel Terhadap Palestina. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yougyakarta, 2021). hal 3.

Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum PBB. Posisi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina mendukung langkah bagi Palestina untuk mewujudkan Kemerdekaan. Karena bagi Indonesia, isu Palestina menjadi isu sentral khususnya dibagian Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menekankan upaya negosiasi untuk mengakhiri penduduk Israel di Palestina. Indonesia meminta PBB memastikan akses bantuan kemanusiaan ke Palestina dan mendorong negosiasi multilateral yang kredibel.<sup>83</sup>

Pemerintah Turki yang dipimpin oleh Presiden Tayyip Erdogan telah mengancam keras aksi kekerasan oleh Zionis di Masjid Al-Aqsa dan menyebut Israel sebagai negara teroris. Kekerasan tersebut yang menggemparkan masyarakat internasional melali sosial media, membuat akun Twitter Friends of Al-Aqsa sebuah organisasi kemanusiaan yang berbasis di London mengungkapkan apresiasinya upaya membela Palestina dan menghentikan penyerangan kepada warga sipil. Tidak hanya di Inggris ribuan pemuda di Turki juga mengepung Kedutaan Israel di Ankara dan konsulatnya di Istanbul.

---

<sup>83</sup> Setyo Widagdo dan Rika Kurniaty, “Prinsip Responsibility to Protect (R2P) dalam Konflik Israel-Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia?”. Jurnal Arena Hukum. Vol 14 No 2, (Malang: Universitas Brawijaya, 2021), hlm. 323-324



**Gambar 5.4**

Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara soal kemerdekaan Palestina dalam forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

*Sumber: [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com)*

Pada 20 September 2021, Presiden Joe Biden tampil perdana sebagai kepala negara pada sidang Umum PBB ke-76, Joe Biden mendukung Palestina merdeka dalam pidatonya di Sidang Umum PBB. Joe Biden juga mengedepankan pandangannya akan konsep multilateralisme dan berfokus pada diplomasi. Joe Biden mengutarakan Palestina merdeka merupakan jalan yang terbaik. Joe Biden menambahkan bahwa solusi dua negara adalah cara terbaik untuk memastikan masa



depan Israel hidup dalam damai dan keamanan bersama dengan negara Palestina dalam Konflik Israel-Palestina<sup>84</sup>

### 5.5 Proses Perdamaian Israel-Palestina

Perdamaian antara Israel dan Palestina merupakan suatu rencana yang penting terkait tujuan yang ingin dicapai AS di Timur Tengah. Oleh karena itu, setiap presiden yang menjabat selalu mengupayakan usaha terbaik untuk mencapai perdamaian. AS selama bertahun-tahun memiliki berbagai pendorong kebijakan luar negeri terhadap Timur Tengah secara umum dan Konflik antara Israel-Palestina secara khusus. Maka dari itu dapat dilihat dalam upaya AS dalam proses perdamaian dimulai dari Perundingan Oslo sampai solusi dua negara.

Pada tahun 1993 proses perdamaian Israel Palestina dimulai. melakukan perjanjian yang dinamakan Perundingan Oslo 1993 sebagai perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina yang dinyatakan berhasil, meskipun ditolak oleh Hamas dan kelompok lain. Perjanjian Oslo ditandatangani di gedung Putih pada 13 September 1993 oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Negosiator Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Mahmoud Abbas menandatangani perjanjian ini menjadi dasar dari pembentukan “deklarasi prinsip tentang pengaturan pemerintahan sendiri sementara Palestina” dan Israel secara bertahap mengundurkan diri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat dan menyerahkan kedaulatan kepada Otoritas

---

<sup>84</sup> Danur Lambang Priandiandaru, “*Joe Biden Dukung Palestina Merdeka dalam Sidang Umum PBB*”, 2021. Diakses melalui: <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/23/071518570/joe-biden-dukung-palestina-merdeka-dalam-sidang-umum-pbb?page=all> pada 15 Juli 2022.

Palestina (PA) selama periode lima tahun. Selain itu kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konfrontasi dan konflik serta saling mengakui hak-hak politik dan keabsahan eksistensi masing-masing.<sup>85</sup>

Sebagai mediator konflik Israel-Palestina, AS menindaklanjuti Perundingan Oslo pada tahun 1993 dengan mengadakan Perundingan Oslo II dua tahun kemudian. Pembahasan Perundingan Oslo II guna memperluas wilayah otonomi Palestina, mencakup masa depan Kota Yerusalem dan masalah lain yang melibatkan keamanan, perbatasan, status pemukiman di Tepi Barat, dan hak masing-masing negara. Perundingan Oslo II juga menjabarkan ketentuan untuk pemilihan umum, urusan sipil/hukum, dan kerjasama bilateral Israel-Palestina lainnya dalam berbagai masalah. Pada 28 September 1995 ditandatangani Perundingan Oslo II dengan hasil bahwa Palestina memiliki otoritas dalam mengawasi Gaza dan Tepi Barat dengan yuridiksi terbatas.<sup>86</sup>

Kesepakatan Oslo ternyata tidak memberikan AS tanggung jawab penuh menyadari Bill Clinton bahwa ia memiliki keterbatasan dan kekurangan pada meredakan krisis. Oleh karena itu, Bill Clinton memutuskan untuk memberikan bantuan keamanan serta bantuan ekonomi kepada Palestina.

---

<sup>85</sup> Simela Victor Muhammad. *“Info Singkat: Perundingan Perdamaian Palestina-Israel”*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI. Vol V No.15, 2013. hal.7.

<sup>86</sup> ACPR. *“The Israeli-Palestinian Interim Agreement (Oslo II): Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip”*, 1995. Diakses melalui: <http://www.acpr.org.il/publications/books/44-Zero-isr-pal-interim-agreement.pdf>, pada 20 Juli 2020.

Jerusalem Embassy Act disahkan oleh AS tak sampai dari satu bulan Perjanjian Oslo II ditandatangani. Senat mengusulkan mengadopsi undang-undang ini dan mendapatkan dukungan luar biasa penuh. Namun, Bill Clinton memilih untuk tidak menandatangani Jerusalem Embassy Act menjadi hukum tanpa tanda tangan Presiden pada 8 November 1995. Walaupun hukum ini tidak disepakati, namun sudah menandakan pengakuan AS secara utuh terhadap kedaulatan Israel, khususnya bagi Kota Yerusalem, dan memperjelas posisi keberpihakan AS terhadap proses perdamaian Israel Palestina.

Netanyahu membuat penandatanganan persetujuan Hebron pada tanggal 15 Januari 1997 bahwa Israel bersedia menyelesaikan penarikan pasukan selama 10 hari sejak sah bahwa sudah ditandatangani persetujuan tersebut. Khawatir bahwa proses perdamaian akan runtuh Bill Clinton tak berhenti sampai disitu saja, melanjutkan tugasnya sebagai mediator dengan mengundang Arafat dan Netanyahu ke Perkebunan Sungai Wye. Mereka bertiga menegosiasikan sebuah perjanjian yang menyerukan kelanjutan dari penarikan Israel dari Tepi Barat. Kesepakatan ini ditandatangani pada 23 Oktober 1998 dan mulai berlaku pada 2 November 1998. Kesepakatan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari Perjanjian Oslo II dan Protokol Hebron yang belum tuntas diterapkan oleh Israel.

Kesepakatan Wye River tidak berjalan mulus sesuai rencana karena pihak Israel dan Palestina saling menuduh satu sama lain, sehingga mereka memutuskan

untuk tidak melakukan implementasi lebih lanjut. Namun pada akhirnya pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Tiga bulan kemudian saat upaya perdamaian tak kunjung menemukan titik hasil, pemukiman Yahudi terus berlangsung sehingga memicu meletusnya gerakan perlawanan luas rakyat Palestina untuk merebut kembali tanah palestina terhadap pendudukan Israel atau yang biasa disebut intifada kedua. Intifada kedua didatangkan oleh kunjungan provokatif Pimpinan oposisi Israel, Ariel Sharon ke kompleks Masjid Noble Sanctuary di Yerusalem.

AS melangsungkan pertemuan terbuka yang melibatkan lebih dari 40 negara pada masa pemerintahan Presiden George Bush Jr. Pertemuan ini diadakan pada 27 November 2007 di Akademi Angkatan Laut AS di Anapolis. Konferensi Anapolis 2007 dalam agendanya tentang masalah kedaulatan negara Palestina, pemukiman Israel, perbatasan wilayah Palestina dengan Israel, dan pembagian sumber mata air.

Agenda Konferensi Anapolis, pendapat atau masukan George Bush Jr yang dikenal dengan *The Road Map*. Pendapat ini menganjurkan Palestina untuk segera melangsungkan pemilihan umum untuk membangun demokrasi, mengatakan secara tegas sikap terhadap terorisme, dan Israel harus menghentikan serangan, penyitaan maupun pembongkaran terhadap warga Palestina, menutup semua aktivitas pemukiman dan membongkar pos-pos pemukiman.

Konferensi Anapolis sama seperti upaya AS yang sebelum-sebelumnya yang mengalami kegagalan. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: peningkatan pemukiman Yahudi di Palestina oleh Israel, keadaan yang mulai tidak kondusif pada pertengahan 2008 antara Israel dan Palestina teristimewa di wilayah Gaza walaupun keduanya melakukan gencatan senjata selama beberapa bulan sebelumnya, dan pembatasan bantuan masyarakat internasional kepada warga Palestina di Gaza akibat blokade Israel.

Pada pemerintahan Obama memiliki perbedaan dibandingkan dengan para pendahulunya. Hubungan AS dan Israel pada pemerintahan Obama merupakan hubungan antar kedua negara yang hampir jarang didapat. Pemerintahan Obama memilih untuk bersikap baik kepada Palestina dengan bertujuan membangun kepercayaan Palestina sehingga bersedia melanjutkan proses perdamaian dengan Israel yang selama ini selalu gagal dan tidak kunjung selesai. Mayoritas publik sangat menaruh harapan lebih karena Obama adalah seorang presiden yang memang dilahirkan sebagai Muslim. Obama juga beranji kepada umat Islam sedunia untuk mengamati nasib dan membantu kemerdekaan Palestina.

Pemerintahan Obama menggunakan mekanisme negosiasi langsung (*direct negotiation between Israel and Palestinians*). Mediasi yang dilaksanakan pada 2 September 2010 dan diwakilkan oleh Obama, Netanyahu sebagai wakil dari Israel, dan Abbas sebagai wakil dari Otoritas Palestina. Obama sebagai fasilitator negosiasi

langsung upaya mediasi AS terhadap konflik Israel dan Palestina. Akan tetapi, Obama mengalami kegagalan sama seperti perundingan-perundingan sebelumnya.

Kegagalan ini dapat dilihat sebagai pengaruh para kelompok lobi pro-Israel dalam kebijakan luar negeri AS. Obama dalam kemenangannya dalam Pemilu 2008, ditemukan menerima bantuan dari para Yahudi kelompok lobi pro-Israel. Obama bahkan berjanji untuk mendukung Israel dalam konfliknya dengan Palestina. Maka, kebijakan yang dikeluarkan Obama cenderung keraguan. Walaupun terkesan tenang terhadap Palestina, namun hal tersebut tidak memberikan hasil apapun. Obama bahkan memberikan bantuan militer senilai \$38 miliar kepada Israel.

Dari perundingan Oslo sampai negosiasi langsung yang dilakukan oleh Obama, memiliki kesamaan yakni solusi dua negara. Kesepakatan Oslo bahkan berasal dari ide solusi dua negara merupakan salah satu solusi yang terbaik Israel dan Palestina dan merupakan ide yang terbaik. Solusi dua negara merupakan salah satu solusi konflik Israel dan Palestina yang dimana konsep dua negara untuk dua warga. Solusi ini menjelaskan negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel. Partition Plan UNSCOP pada tahun 1947 merupakan ide solusi dua negara.

Beberapa dekade terakhir ini, Israel dan PA yang belum mencapai kesepakatan yang berhasil melalui negosiasi. Gerakan perlawanan didominasi Hamas di Gaza, beberapa serangan di Gaza oleh pasukan Israel memicu keberlangsungan konflik dan membuat keadaan yang semakin memburuk menimbulkan keraguan pada

solusi dua negara. Realisasi gagasan solusi dua negara semakin sulit sejak tujuh puluh lima tahun konflik hanya untuk sebuah pengakuan kedaulatan. Dikarenakan realita dilapangan yang sangat kompleks, paradigma tentang negosiasi perdamaian, tren politik yang memperlemah kemungkinan perdamaian dan pertanyaan-pertanyaan mengenai status final isu isu yang krusial.

